



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala BNPB RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 22 Maret 2021.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Penyesuaian penggunaan (Refocussing) Kebijakan APBN Tahun 2021 2. Isu – Isu Aktual Lainnya
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 39 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala BNPB RI Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, dan M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas **“Penyesuaian Penggunaan (*Refocusing*) Kebijakan APBN Tahun 2021, Isu-isu Aktual dan Alternatif Solusinya”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI memahami paparan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Penyesuaian Penggunaan (*Refocusing*) Kebijakan APBN Tahun 2021, Isu-isu Aktual dan Alternatif Solusinya. Namun demikian, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, bahwa BNPB tidak mendapat *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021.
2. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui penambahan Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 dari Rp813.103.749.000,- (*Delapan Ratus Tiga Belas Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) menjadi Rp814.755.204.000,- (*Delapan Ratus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah*) setelah mendapatkan hibah dari *Islamic Development Bank* (IDB) sebesar Rp1.651.455.000,- (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana alam tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dan usulan anggaran Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp5.244.615.391.539,- (*Lima Triliun Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
4. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk segera menyelesaikan tunggakan biaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2020 dengan tetap memperhatikan audit BPKP.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Meminta BNPB meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan bencana di berbagai daerah dengan memperhatikan masukan dari daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR RI.
- b. Mendorong BNPB untuk lebih proaktif dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- c. Mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi ancaman dan potensi bencana yang sangat tinggi dan beragam jenisnya.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H.YANDRI SUSANTO, Spt.**